

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Secara umum komoditas yang mempengaruhi inflasi di Kabupaten Cirebon pada triwulan 3 tahun 2024 yaitu Bensin, Batagor, Bimbingan Belajar, Baju kaos tanpa kerah, dan rujak. Kenaikan inflasi pada bahan bakar minyak yaitu disebabkan adanya penyesuaian harga Bahan bakar Minyak (BBM). Resiko ke depan dengan adanya penyesuaian tarif BBM maka dapat mempengaruhi harga bahan pokok penting masyarakat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) disebabkan karena mengikuti kenaikan harga minyak mentah dunia, inflasi, dan nilai tukar rupiah. Penyesuaian harga ini dilakukan secara bertahap untuk menyelaraskan dengan badan usaha lain.
- Bimbingan belajar yang mempengaruhi angka inflasi pada triwulan 3 tahun 2024 disebabkan karena memasuki ajaran tahun baru sehingga banyak masyarakat yang menggunakan jasa bimbingan belajar.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi bertujuan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar tidak mengalami kenaikan yang berlebihan dan mengganggu perekonomian. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah daerah dan bank sentral melalui berbagai instrumen. Berikut adalah beberapa kebijakan utama dalam pengendalian inflasi:

1. Peningkatan intensitas pelaksanaan Operasi pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di wilayah Kabupaten Cirebon dengan berbagai komoditas Bahan Pokok Penting Masyarakat yang juga bekerjasama dengan Forkopimda dan Satgas Pangan.
2. Pemberian bantuan alat produksi pertanian yang merupakan kerjasama dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Cirebon.
3. Pelaksanaan Sidak keterjangkauan harga dan stok pangan di beberapa pasar daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah.
4. Rapat Koordinasi mingguan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Cirebon setelah menyaksikan zoom meeting perkembangan Inflasi nasional oleh Kemendagri.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah dilakukan untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang telah diterapkan serta mengidentifikasi tantangan dan perbaikan yang diperlukan. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah:

1. Evaluasi terkait stabilitas harga dengan cara Sidak keterjangkauan dan stok bahan pokok penting masyarakat di seluruh pasar daerah
2. Koordinasi intens antara pemerintah daerah, bank Indonesia, dan sektor swasta dalam proses pengendalian inflasi daerah
3. Peran BUMD dalam menjaga stabilitas pasokan barang strategis

Penguatan Teknologi sebagai Early Warning System jika terjadi lonjakan harga yang

4. cukup signifikan.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

**Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah** agar lebih efektif dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat:

1. Memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Cirebon,
2. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan teknologi dalam pemantauan harga serta prediksi inflasi melalui sistem Early Warning System misalnya Si Kepokmas,
3. Meningkatkan cadangan pangan daerah,
4. Meningkatkan produksi ketahanan pangan lokal.